

Title : Ancaman Krisis Pangan Dunia Mendorong Penguatan Hubungan
Indonesia dan Malaysia

Author(s) : Deden Hidayat

Institution : Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Category : Article

Topics : Policy, Law, Government, Health, Food

Ancaman Krisis Pangan Dunia Mendorong Penguatan Hubungan Indonesia dan Malaysia

Pandemik Covid-19 yang melanda dunia menjadi salah satu bencana non-alam yang sangat memengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Penyebaran virus yang massif membuat para pembuat kebijakan negara terpaksa untuk membatasi pergerakan warga mereka baik secara domestic maupun internasional guna menghindari penularan. Pandemi ini berlangsung cukup lama yang di mulai dari akhir 2019 di Wuhan, China dan mulai menyebar hampir keseluruh dunia pada awal 2020. Hingga saat ini Covid-19 nyatanya masih menghantui masyarakat meskipun tidak separah pada saat pertengahan tahun 2021 karena saat ini vaksin telah digunakan, masyarakat yang sudah sadar dalam menghindari penularan, dan kebijakan ketat pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Pembatasan pergerakan masyarakat membuat banyak perubahan pola kehidupan sehingga memengaruhi banyak sector, salah satunya ialah sector pangan. Perubahan daya beli masyarakat secara global membuat beberapa komoditas mengalami kelangkaan disusul dengan berbagai permasalahan seperti tingginya harga pupuk, pembatasan ekspor dan impor, penimbunan, dan lain sebagainya. Kebijakan satu negara dapat memengaruhi sector ekonomi negara lainnya, seperti halnya China yang memiliki kebijakan untuk meningkatkan kuantitas ternak babinya secara massif mengakibatkan negara China memborong banyak sekali kedelai sebagai salah satu bahan pakan ternak. Kebijakan tersebut nyatanya sangat dirasakan oleh Indonesia karena Indonesia hamper 60% melakukan impor kedelai untuk kebutuhan pangan untuk olahan panganan seperti tempe dan tahu. Tak hanya Indonesia saja negara lainnya yang berada di Kawasan Asia Tenggara juga merasakan dampak dari penerapan kebijakan ekonomi suatu negara yang dapat merugikan sector pangan mereka.

Kebijakan yang terlalu serakah oleh suatu negara memang sangat berdampak pada negara lainnya, selain itu perubahan iklim yang terjadi di bumi saat ini tentu saja memengaruhi hasil pangan dunia. Krisis pangan di tahun 2022 ini sebenarnya sudah banyak melanda di banyak negara. Meskipun secara keseluruhan banyak masyarakat dan pemangku kebijakan yang belum sadar akan ancaman ini membuat permasalahan ini dianggap sebelah mata. Hal ini sebenarnya sangat dirasakan oleh masyarakat dengan naiknya harga bahan pangan saat ini. Krisis pangan dipengaruhi oleh perubahan iklim dunia, bencana alam, dan perilaku konsumsi masyarakat.

Akibatnya para pekerja yang bergerak di sector pangan seperti petani, nelayan, peternak dan lain sebagainya mengalami penurunan kuantitas.

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang berada di Kawasan Asia Tenggara yang memiliki banyak kemiripan dari banyak aspek. Hal ini disebabkan oleh sejarah panjang dari zaman kerajaan di antara kedua negara tersebut. Sehingga tidak mengherankan banyak kemiripan di antara keduanya seperti hidangan, budaya, Bahasa, dan kehidupan social. Mengenai permasalahan pangan yang terjadi saat ini tentunya juga memengaruhi kedua negara, keduanya memiliki bahan pokok pangan yang sama, penggunaan bumbu yang tidak jauh berbeda, dan penyajian hidangan yang sama. Hal ini tentunya menjadi permasalahan yang dapat diselesaikan secara bersama, terlebih keduanya juga tergabung di *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) yang memudahkan mereka dalam melakukan kerja sama bilateral mengenai penguatan sector pangan. Indonesia sendiri memiliki undang-undang yang mengatur mengenai permasalahan pangan nasional yakni Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Sejak tahun 1961 Malaysia telah memiliki undang-undang tentang langkah-langkah pengendalian harga (*price control act*). Tak hanya itu, Malaysia juga telah memiliki undang-undang tentang langkah-langkah pengendalian suplai (*supply control act*).

Kondisi pangan dunia yang menghadapi krisis sebenarnya dapat mendorong Indonesia dan Malaysia melakukan kerja sama dalam sector pangan. Kerja sama Internasional dalam pengembangan pangan dapat dilakukan apabila diinisiasi oleh kedua belah pihak setelah mendapat izi dari Menteri terkait. Dengan pertimbangan permasalahan pangan yang ada maka kebijaksanaan pangan harus dapat mengakomodasikan dan menyeimbangkan antara aspek penawaran dan permintaan. Pengelolaan kedua aspek tersebut harus mampu mewujudkan ketahanan pangan bagi kedua negara tersebut sehingga dapat menghadapi segala gejolak. Pengelolaannya harus dilakukan dengan optimal mengingat kerja sama di antara dua negara juga kadang kala tidak dapat berjalan dengan lancar.

Hubungan Indonesia dan Malaysia yang kadang kala tidak selamanya baik nampaknya dapat diertakan Kembali dengan melakukan kerja sama dalam pertahanan pangan, kedua negara yang berbatasan baik secara darat dan lautan ini dapat secara Bersama-sama membangun daerah perbatasannya dalam kenaikan produktifitas pangan. Terlebih kondisi perbatasan yang selama ini cenderung dapat menimbulkan ketegangan di antara kedua negara dapat dimanfaatkan dengan

melakukan pengembangan pangan dan pemberdayaan wilayah perbatasan. Dataran Indonesia dan Malaysia yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dalam pertanian dapat menjadi modal dasar bagi kedua negara tersebut untuk mengembangkan potensi lahan. Pada daerah perairan juga kedua negara ini berada pada wilayah perairan strategis dan memiliki kekayaan alam yang sangat kaya sehingga dapat dilakukan kerja sama yang dapat saling menguntungkan.

Banyaknya kesamaan di antara Malaysia dan Indonesia seharusnya dapat mempermudah kedua negara tersebut untuk melakukan kerja sama yang menguntungkan. Serumpunnya ras antara kedua negara ini mendorong keduanya untuk saling memahami dan pengertian. Akan tetapi memang pada praktiknya keharmonisan belum dapat dilakukan secara maksimal. Rasa egois dan menganggap perlunya bersaing dengan negara tetangga yang dilakukan oleh beberapa oknum membuat konflik lateral yang tidak berkesudahan. Permasalahan pangan saat ini dapat menjadi momentum bagi kedua pemerintah tersebut untuk merekatkan hubungan mereka untuk mengatasi permasalahan pangan yang sudah ada di depan mata.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahayu, A. S. (2020). Antisipasi Krisis Pangan. *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*.
- Lasminingrat, L., & Efriza, E. (2020). Pembangunan Lumbung Pangan Nasional: Strategi Antisipasi Krisis Pangan Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 10(3), 243-260.
- Sabaruddin, S. S. (2016). Penguatan diplomasi ekonomi Indonesia mendesain clustering tujuan pasar ekspor Indonesia: pasar tradisional vs pasar non-tradisional. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(2), 205-219.
- Nofansya, A., & Sidik, H. (2022). Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand: Penguatan Local Currency Settlement (LCS) Framework Dalam Memfasilitasi Perdagangan. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 4(2), 164-178.
- Atem, N. N. (2020). Persoalan kerawanan pangan pada masyarakat miskin di wilayah perbatasan Entikong (Indonesia-Malaysia) Kalimantan Barat. *Jurnal Surya Masyarakat p-ISSN*, 2623, 0364.
- Kontan, 2017, Tiru Malaysia, BI usul pembentukan UU Harga Pangan, <https://nasional.kontan.co.id/news/tiru-malaysia-bi-usul-pembentukan-uu-harga-pangan>, diakses pada 01 September 2022 pukul 17.05 WIB